

SKRIPSI

**POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMBATAAN DANA KAMPANYE
UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERKEADILAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

PUTRI ANDAM DEWI

1410112133

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)




Dosen Pembimbing:

- 1. Yunita Syofyan, S.H., M.H.**
- 2. Delfina Gusman, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2021

	No. Alumni Universitas	Putri Andam Dewi	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir : Aceh/10 Juli 1996	f) Tanggal Lulus : 05 Mei 2021	
b) Nama Orang Tua : Daniel Adnan, Hasanah	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan		
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3,65		
d) PK : Hukum Tata Negara	i) Lama Studi : 6 Tahun 11 Bulan		
e) BP : 1410112133	j) Alamat : Jl. Riau No.44, RT 001/RW 004, Kel. Ibuah, Payakumbuh		

POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMBATASAN DANA KAMPANYE UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERKEADILAN

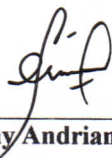

Putri Andam Dewi, 1410112133, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V Hukum Tata Negara, 66 Halaman, 2021

ABSTRAK

Pemilu yang berkeadilan merupakan salah satu mandat konstitusional yang secara tegas dimuat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya penyelenggara pemilu, tetapi seluruh pihak yang terlibat di dalam kepemiluan tersebut, baik itu penyelenggara, peserta, masyarakat pemilih dan semua pihak yang terkait haruslah bersikap adil. Persoalan pendanaan kampanye dalam pemilu sesungguhnya menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan. Dana kampanye pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana pengaturan pembatasan dana kampanye pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan yang kedua adalah bagaimana politik hukum pengaturan pembatasan dana kampanye untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkeadilan. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaturan pembatasan dana kampanye pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan yang kedua adalah untuk mengetahui politik hukum pengaturan pembatasan dana kampanye untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dana kampanye pemilu di Indonesia masih belum cukup untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan. Pemilu di Indonesia merupakan pemilu yang dirasa cukup menguras banyak biaya bagi peserta pemilu guna mendanai kampanye. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan tentang batasan dana kampanye untuk meminimalisir pengeluaran dana kampanye serta memberikan kesetaraan bagi para peserta pemilu. Dengan adanya pengaturan tentang batasan dana kampanye tersebut maka diharapkan pemilu yang berkeadilan dapat terwujud.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 05 Mei 2021. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	Henny Andriani, S.H., M.H.	Beni Kharisma Arrasuli, S.H.I., L.L.M.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara: **Arfiani, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: